

**PERAN PENYULUH AGAMA HINDU NON PNS TERHADAP PENDIDIKAN DAN
SRADHA GENERASI MUDA HINDU DI KECAMATAN TAMANSARI KABUPATEN
BOYOLALI**

Oleh:

I Made Rai Ardana, Farida Setyaningsih, Dewi Ayu Wisnu Wardani

Sekolah Tinggi Hindu Dharma Klaten Jawa Tengah

dewidanendra3@gmail.com

ABSTRAK

Penyuluhan Agama Hindu adalah suatu kegiatan memberi sesuluh atau penjelasan ajaran agama Hindu dalam rangka pembinaan umat agar dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Hindu dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik. Seorang penyuluh dapat berfungsi untuk menginformasikan, mendidik, menghibur dan mempengaruhi. Tugas pokok dari seorang penyuluh agama yaitu melaksanakan penyuluhan untuk membina mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pembentukan budi ekerti luhur, sebagai landasan hidup beragama, berbangsa dan bernegara.

Penelitian ini membahas tentang kondisi Penyuluh Agama Hindu di Provinsi Jawa Tengah, Sasaran dan wilayah binaan Penyuluh Agama Hindu Non PNS di Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali, Metode yang digunakan dalam penyuluhan, peran Penyuluh terhadap Pendidikan dan Sradha umat Hindu, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penyuluhan. Untuk memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan metode pengumpulan data, metode observasi, metode wawancara, metode kepustakaan dan pendokumentasian. Kemudian data tersebut di analisa secara diskriptif interpretative menggunakan pendekatan konsep dan seperangkat teori yaitu Teori Fungsionalisme Struktural, Teori Interaksionisme Sosial dan Teori Peran.

Secara umum diketahui bahwa di Provinsi Jawa Tengah memiliki 78 Penyuluh Agama Hindu, 3 Penyuluh PNS dan 75 Penyuluh Non PNS yang tersebar di 23 Kabupaten/Kota. Penyuluh Agama Hindu Non PNS wilayah Kecamatan Tamansari telah melaksanakan kegiatan Penyuluhan pada semua jenjang usia dari anak-anak, Remaja dan Orang Tua. Metode yang digunakan untuk melakukan penyuluhan yaitu dengan Metode Sad Dharma dengan Lokasi Pembinaan di Pura Bhuana Puja, Pasraman Bhuana Puja, Pura Satya Dharma, Pura Yasa Dharma, Paguyuban KORPRI Kecamatan Musuk. Pembagian wilayah binaan telah disepakati oleh masing-masing

Penyuluh Agama Hindu Non PNS di Kecamatan Tamansari Agus Sugiyono di Pura Satya Dharma, Agung Puji Widoyo di Pura Yasa Dharma, Wiyono dan Purwani di Pura Bhuana Puja.

Peran Penyuluh Agama Hindu Non PNS dalam meningkatkan Pendidikan dan Sradha Generasi Muda Hindu diarahkan kepada Peningkatan Pendidikan Siswa Sekolah, Peningkatan Mental dan Spiritual Generasi Muda Hindu, Meningkatkan Pengetahuan Agama Hindu dan Keimanan Umat, Melestarikan Kebudayaan, Melakukan Kaderisasi Terhadap Tokoh-tokoh Hindu, dan Meningkatkan Kerukunan antar umat Hindu.

Kendala yang dihadapi oleh Penyuluh Agama Hindu Non PNS secara umum dibagi menjadi dua yaitu pada kondisi wilayah binaan yang tergolong jauh dari tempat tinggal Penyuluh, sehingga kurang maksimal dalam melakukan penyuluhan sehingga agar semua kegiatan dapat terlaksana maka dijadwalkan dengan baik dalam pengaturan waktu. Kendala yang kedua adalah melibatkan kurangnya kesadaran anak muda dalam mengikuti pembinaan sehingga terkesan tidak serius dalam mengikuti pembinaan, serta umat yang kurang memahami Bahasa Indonesia membuat Penyuluh belajar ulang dalam menghadapi Umat Hindu.

Kata Kunci : Peran, Penyuluh Agama Hindu Non PNS, Generasi Muda Hindu

I. PENDAHULUAN

Menyongsong era Milenial dewasa ini tantangan modernisasi disertai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat menuntut umat beragama untuk melaksanakan reaktualisasi ajaran agamanya, karena dengan demikian agama akan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan peradaban dan kemanusiaan. Kebijakan pengadaan Penyuluh Agama pada Kementerian Agama dimulai sejak tahun 1985, yang didasarkan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 791 Tahun 1985, tentang Honorarium bagi Penyuluh Agama (Lastra : 2020).

Secara administratif istilah penyuluh agama dipergunakan untuk menggantikan istilah Guru Agama Honorer (GAH) yang dipakai sebelumnya di lingkungan Kedinasan Kementerian Agama. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 87 Tahun 1999, menempatkan Penyuluh dalam Keppres bahwa Rumpun Keagamaan adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil. Dalam kebijakan selanjutnya Restrukturisasi Jabatan Kementerian Agama mulai diterapkan dengan semangat birokrasi saat itu dengan istilah miskin struktur kaya fungsi, dikembangkanlah Jabatan Fungsional pada struktur Kementerian Agama yang salah satunya adalah Jabatan Penyuluh Agama.

Pada Tahun 2000, mulai diangkat Penyuluh Agama PNS, pertama kali dilakukan melalui inpassing pada PNS yang telah ada atau mengalihkan Pejabat Esselon V yang dihapuskan, kemudian tahun berikutnya secara bertahap mulai ada quota pengangkatan untuk Penyuluh Agama PNS. Dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang

Honorarium Bagi Penyuluh Agama Non PNS di putuskan bahwa honor naik menjadi Rp. 1.000.000 perbulan.(Sugiman, 2020)

Provinsi Jawa Tengah mempunyai Penyuluh sejumlah 78 orang yang terdiri dari 3 orang Penyuluh PNS dan 75 Penyuluh Non PNS yang tersebar di 23 Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah. Keberadaan Penyuluh Agama Hindu memerlukan berbagai ketrampilan dan kecakapan dalam melakukan penyuluhan. Penyuluhan adalah proses perhubungan antara dua orang atau phak yang menyampaikan dan menerima suatu pesan dengan mempergunakan suatu sarana. Penyuluh menyampaikan pikiran atau perasaannya kepada pendengar melalui suara. Penyuluh memperjelas pesan materi yang ingin disampaikan melalui kata itu, dengan menggunakan intonasi gerak-gerik dan mimik sesuai dengan pikiran dan perasaan yang ingin dikemukakannya.

Penyuluhan Agama Hindu adalah suatu kegiatan memberi sesuluh atau penjelasan ajaran agama Hindu dalam rangka pembinaan umat agar dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Hindu dengan kualitas dan kwantitas yang lebih baik. Seorang penyuluh dapat berfungsi untuk menginformasikan, mendidik, menghibur dan mempengaruhi. Tugas pokok dari seorang penyuluh agama yaitu melaksanakan penyuluhan untuk membina mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pembentukan budi ekerti luhur, sebagai landasan hidup beragama, berbangsa dan bernegara.

Pembangunan Nasional pada dasarnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya. Hal ini akan melibatkan manusia, lingkungan dan masyarakat sebagai konsenkuensinya. Oleh karena itu seluruh aspek kehidupan manusia dan masyarakat harus mendapat perhatian dan pengharapan dalam pembangunan, termasuk didalamnya masalah-masalah sosial.

Kehidupan sosial yang akan menjadi perhatian adalah peningkatan kesejahteraan sosial dan pembangunan yang sedang berlangsung dalam kaitannya dengan segi pendidikan, perumahan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya lainnya. Pembangunan kesejahteraan sosial tersebut harus diusahakan bersama oleh seluruh masyarakat dan pemerintah atas azas kekeluargaan. Oleh karena itu, masalah sosial merupakan masalah yang kompleks dan rumit karena tidak dapat dipandang sebagai masalah yang berdiri sendiri tetapi menyangkut penghidupan dan kehidupan masyarakat dan manusia.

Koentjaraningrat (1985:14) berpandangan pelaksanaan pendidikan dipandang perlu bagi manusia atau masyarakat itu sendiri. Hal ini sesuai dengan hakekat pendidikan yakni untuk meningkatkan budi pekerti dan intelektual atau keterampilan yang tinggi pada setiap individu sebagai suatu mentalitas manusia. Mentalitas manusia, sebagai syarat suatu nilai budaya yang berorientasi ke masa depan, suatu sifat hemat, suatu hasrat untuk bereksplorasi dan berinovasi, suatu pandangan hidup yang bernilai tinggi dari karya, suatu nilai budaya yang kurang berorientasi vertikal, suatu sikap yang lebih percaya pada kemampuan sendiri, berdisiplin murni dan berani bertanggung jawab.

Penanaman mentalitas tersebut dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab IV bagian kesatu pasal 13 ayat 1

menyebutkan pendidikan dapat dilaksanakan dalam berbagai jalur pendidikan yakni; pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya, sehingga menciptakan masyarakat belajar, untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan Hindu melalui prinsip pendidikan seumur hidup.

Pendidikan yang dimaksud melingkupi pendidikan budi pekerti. Budi pekerti perlu ditanamkan pada era krisis multidimensional seperti sekarang ini. Seperti dijelaskan Sumardi (1982 : 10-11) krisis tersebut ditandai dengan lemahnya dalam berbagai bidang kehidupan manusia baik dalam sektor politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, spiritual (mental) serta kepemimpinan, memunculkan pertimbangan dari para tokoh keagamaan untuk menjadikan agama sebagai motivator bagi masyarakat yang memeluknya dan meningkatkan fungsi-fungsi agama sebagai pengendali moral.

Dalam perspektif Agama Hindu bahwa Pendidikan dimaknai tidak semata-mata hanya sebatas kegiatan belajar mengajar saja. Akan tetapi lebih jauh diartikan sebagai proses pematangan dan pendewasaan untuk mewujudkan manusia yang lebih manusiawi, yang dalam agama Hindu ditandai dengan Upacara *Manusia Yadnya*. Upacara ini dilaksanakan sejak manusia masih janin hingga lahir dan melangsungkan perkawinan setelah dewasa.

Manusia Yadnya merupakan pendidikan, pemeliharaan dan pensucian secara spiritual terhadap seorang anak sejak terwujud jasmani didalam kandungan hingga sampai akhir hidupnya. Artinya proses pendidikan tidak hanya terjadi ketika manusia terlahir, tetapi telah berlangsung dan dapat diberikan ketika anak masih dalam kandungan sebagai pendidikan prenatal. Bahkan pembentukan watak itu sudah dimulai ketika ibu dan bapak mengadakan senggama dengan tujuan mendapat anak yang *suputra*.

Pendidikan yang bercorakkan Hindu di Indonesia pada saat ini sangat dibutuhkan, hal itu dikarenakan pendidikan sangat penting guna meningkatkan pengetahuan, kecerdasan dan kemantapan spiritual manusia pada umumnya dan umat Hindu pada khususnya. Dengan demikian pendidikan tentang agama Hindu sangat diperlukan di masyarakat sehingga terbentuklah insan-insan Hindu yang agamis dan intelek. Sejak tahun 2003 telah dibentuk suatu konsep lembaga pendidikan Hindu yang bernama *Pasraman*.

Pasraman yang merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berbasis Hindu memiliki peranan yang cukup penting dalam proses pengajaran ajaran agama Hindu. Selain pengajaran ajaran agama Hindu pasraman juga dituntut untuk bisa mengembangkan ilmu pengetahuan di luar ajaran agama demi tercapainya sumber daya manusia Hindu yang berkualitas dan juga berbudi pekerti luhur.

Secara umum Penyuluh Agama memiliki empat fungsi *Pertama* Fungsi informatif memposisikan dirinya sebagai orang yang berkewajiban menyampaikan pesan-pesan ajaran agama, *Kedua* Fungsi Edukatif memposisikan diri sebagai pembina atau mendidik masyarakat sesuai dengan tuntunan ajaran agama, *Ketiga* Fungsi Konsultatif menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan pribadi, keluarga maupun masyarakat secara umum dan *Keempat* Fungsi Advokatif Penyuluh

agama memiliki tanggung jawab moral dan social untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap masyarakat dari segala bentuk kegiatan/pemikiran yang akan merusak keimanan dan tatanan kehidupan beragama (Lastra : 2020).

Penyuluh Agama memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap masyarakat dari segala bentuk kegiatan/pemikiran yang akan merusak keimanan dan tatanan kehidupan beragama. Peran Penyuluh Agama Hindu Non PNS sangat penting karena Penyuluh merupakan ujung tombak dari sistem pembinaan umat dan sekaligus sebagai agen perubahan terhadap segenap umat Hindu di seluruh wilayah binaan.

Dalam memberikan pembinaan kepada Umat/Masyarakat dilakukan dengan tulus, dan yang terakhir dalam memberikan pembinaan dan pelayanan kepada Umat/Masyarakat dilakukan dengan Ikhlas tanpa mengharapkan imbalan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Penyuluh Agama Hindu Non PNS sangat penting seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta makin kompleksnya problematika pembinaan keumatan.

Keberadaan Penyuluh Agama Hindu Non PNS memiliki andil yang besar dalam upaya memajukan dunia pendidikan Hindu di wilayah Kecamatan Tamansari. Sasaran dari pembinaan yang dilakukan meliputi bidang Pendidikan yaitu melalui Pasraman dan bidang keumatan yang meliputi pemuda sebagai generasi penerus maupun umat Hindu secara umum. Segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Hindu Non PNS memiliki tujuan untuk meningkatkan pendidikan serta *sradha* dan *bhakti* umat Hindu. Keberadaan Penyuluh Agama Hindu Non PNS memiliki peranan yang sangat besar terhadap umat Hindu, hal ini terbukti aktivitas keagamaan yang ada selalu bertumpu pada gerakan maupun gebrakan dari Penyuluh.

II. PEMBAHASAN

1. Kondisi Penyuluh Agama Hindu di Provinsi Jawa Tengah.

Istilah Penyuluh Agama mulai disosialisasikan sejak tahun 1985 yaitu dengan adanya Keputusan Menteri Agama nomor 791 Tahun 1985 tentang honorarium bagi Penyuluh Agama. Istilah Penyuluh Agama dipergunakan untuk mengganti istilah Guru Agama Honorar (GAH) yang dipakai sebelumnya di lingkungan kedinasan Departemen Agama. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil antara lain dinyatakan bahwa untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil perlu ditetapkan jabatan fungsional.

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut di atas, dikeluarkan keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang antara lain menetapkan bahwa Penyuluh Agama adalah Jabatan Fungsional Pegawai Negeri yang termasuk dalam rumpun jabatan keagamaan. Berdasarkan keputusan Menkowsabangan nomor 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 ditetapkan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan angka kreditnya. Untuk pengaturan lebih lanjut dikeluarkanlah keputusan bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 574 Tahun 1999 dan nomor 178 Tahun 1999. Dalam keputusan ini diatur hal-hal yang berkenaan dengan pengangkatan, penilaian,

penetapan angka kredit, kenaikan pangkat, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan Fungsional Penyuluh Agama. (<http://ibnu-qosim.blogspot.com>)

Adapun persebaran Penyuluh Agama Hindu di Provinsi Jawa Tengah seperti terlihat pada Tabel berikut :

**Persebaran Penyuluh Agama Hindu PNS dan Penyuluh Agama Hindu Non PNS
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020**

NO	KAB/KOTA	PNS	NON PNS	JUMLAH
1.	Banjarnegara		1	1
2.	Banyumas		2	2
3.	Blora		1	1
4.	Boyolali	1	9	10
5.	Cilacap		1	1
6.	Grobogan		1	1
7.	Jepara		7	7
8.	Kendal		1	1
9.	Karanganyar	1	7	8
10.	Klaten	1	22	23
11.	Kudus		1	1
12.	Pati		1	1
13.	Pekalongan		4	4
14.	Semarang		2	2
15.	Sragen		3	3
16.	Sukoharjo		2	2
17.	Tegal		1	1
18.	Temanggung		1	1
19.	Wonosobo		1	1
20.	Kota Pekalongan		1	1
21.	Kota Semarang		2	2
22.	Kota Surakarta		3	3
23.	Kota Tegal		1	1
JUMLAH		3	75	78

Tabel IV.2 Persebaran Penyuluh Agama Hindu Provinsi Jawa Tengah

Sumber : Bimas Hindu Kanwil Kemenag Prov. Jateng

Dari 35 Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah masih ada 12 Kabupaten dan Kota yang belum terwakili oleh Penyuluh Agama Hindu. Kabupaten Kota yang belum ada Penyuluh antara lain, Brebes, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Kebumen, Pemalang, Batang,

Rembang, Demak, Magelang, Wonogiri, Kota Salatiga dan Kota Magelang. Untuk itu diharapkan pada kedepannya ada upaya dari Pemerintah untuk mengisi kekosongan yang ada, baik dengan membuka formasi Penyuluh Agama Hindu PNS maupun perekrutan Penyuluh Agama Hindu Non PNS. Keberadaan Penyuluh Agama Hindu di Provinsi Jawa Tengah dalam mempermudah koordinasi terbentuk dalam berbagai Kelompok Kerja Penyuluh. Pembentukan Kelompok Kerja Penyuluh bertujuan untuk merencanakan kegiatan pembinaan umat di wilayah kerjanya masing-masing. Dengan jumlah Penyuluh 78 orang, Provinsi Jawa Tengah memiliki 5 Kelompok Kerja Penyuluh, 1 tingkat Provinsi dan 4 tingkat Kabupaten/Kota.

Keberadaan Kelompok Kerja Penyuluh merupakan sarana atau wadah untuk mengembangkan kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan bimbingan penyuluhan. Dan diharapkan dapat membantu dalam penyusunan program dan evaluasi kegiatan penyuluhan. Dengan adanya Kelompok Kerja Penyuluh segala bentuk permasalahan Penyuluhan dapat dipecahkan dan di cari solusi bersama. Keberadaan Penyuluh Agama Hindu Non Provinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun mengalami perubahan dari segi kuantitasnya. Hal ini terlihat perubahan dari tahun 2012 sampai dengan Tahun 2020 baik dari segi kuantitas maupun jumlah honor yang diterima mulai dari Rp. 150.000 pada Tahun 2012 , sampai Rp. 1.000.000 pada Tahun 2020.

Dalam upaya meningkatkan kualitas Penyuluh dan mempermudah Koordinasi, selain Kelompok Kerja Penyuluh, di Provinsi Jawa Tengah terbentuk 8 Kelompok Binaan, yang terdiri dari 5 Kelompok Binaan Penyuluh, dan 3 Kelompok Desa Binaan. Untuk meningkatkan kualitas Pelayanan dan Operasional, Bimas Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah telah memberikan Bantuan Operasional selama kurun waktu Tahun 2018 s.d. Tahun 2019, dan pada Tahun 2020 juga telah dianggarkan bantuan yang sama. Penyuluh Agama Hindu Non PNS Provinsi Jawa Tengah secara Legal diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2016 sampai dengan 2019. Sedangkan pada Tahun 2020 Kekosongan Kepala Kantor, dan dijabat oleh Pelaksana Tugas dan tidak memiliki kewenangan mengangkat Penyuluh. Oleh karena itu Tahun 2020 Penyuluh Agama Hindu Non PNS Provinsi Jawa Tengah diangkat oleh Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI dengan Nomor SK 1 Tahun 2020.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa keberadaan Penyuluh Agama Hindu Non PNS di Provinsi Jawa Tengah memiliki legal formal yang kuat. Keberadaan Penyuluh Agama Hindu Non PNS di Provinsi Jawa Tengah sangat diperhatikan oleh Pemerintah baik dari segi administrasi dan kesejahteraannya.

2. Sasaran dan Lokasi Binaan Penyuluh di Kecamatan Tamansari.

Dalam melakukan Penyuluh Agama Hindu Non PNS di Kecamatan Tamansari memiliki sasaran dan lokasi pembinaan sebagai berikut :

1. Pura Bhuana Puja

Pura Bhuana Puja merupakan tempat yang digunakan sebagai sekretariat dan pusat kegiatan pasraman Bhuana Puja. Adapun proses pendirian Pura Bhuana Puja dimulai sejak tahun 1985 yang pembangunannya berlangsung secara bertahap sampai dengan saat ini. Berdirinya Pura Bhuana Puja atas tekad dan semangat dari umat Hindu dukuh Tagung Gede dan Wonodadi yang berada di wilayah Desa Karanganyar, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali.

Pura Bhuana Puja berdiri diatas tanah seluas 510 M² tanah tersebut merupakan pemberian dari Bp Pinandita Wiroyitno. Pada tanggal 27 Desember 1985 pembangunan pura diresmikan oleh Bp Gede Sandi, BA selaku direktur urusan agama republik indonesia atas nama Dirjen Bimas Hindu dan Budha Republik indonesia. Pada tahun 1986 mendapatkan rekomendasi dari Bupati Boyolali dan pembangunan dilaksanakan secara bertahap, karena masyarakat Hindu di wilayah Tagunggede termasuk kurang mampu dalam hal ekonomi sehingga pembangunan agak lamban atau tersendat sendat.

Yang menjadi sumber pendanaan tiap ada pembangunan yaitu dari swadaya umat walaupun terkadang mendapat bantuan dari pemerintah maupun pihak-pihak lain. Menurut sejarahnya pada waktu pembangunan pura Bhuana Puja pelaksanaanya dilaksanakan secara bergotong royong baik dari umat Hindu maupun umat agama lain yang ada di Dukuh Tagunggede dan Wonodadi. Hal ini merupakan bentuk kerukunan antar umat beragama, mereka beranggapan Pura merupakan fasilitas umum meskipun hanya digunakan oleh umat Hindu.

Sekarang ini tanah Pura Bhuana Puja telah bersertifikat resmi tertanggal 17 Februari 2006, hak pakai untuk bangunan Pura Bhuana Puja. Hal ini bertujuan untuk memperkokoh keberadaan Pura Bhuana Puja sehingga aman dari penuntutan hak kepemilikan tanah.

Pura Bhuana Puja dapat dikatakan sebagai sentral kegiatan umat Hindu di wilayah Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Musuk. Di Pura Bhuana Puja yang memiliki umat terbesar di kedua Kecamatan ini memiliki banyak kegiatan baik bersifat ritual maupun kemasyarakatan.

2. Pasraman Bhuana Puja

Pasraman Bhuana Puja berdiri pada tahun 2001 berdasarkan SK dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kecamatan Musuk Nomor 454.3/001/KEP/PHDI/2001 per tanggal 1 November 2001 dan telah diperbaharui dengan SK dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Boyolali dengan Nomor Kep.11/PARISADA.BI/I/2015. Pasraman Bhuana Puja merupakan pasraman non formal dimana pendirian dan pengelolaan pasraman dilakukan oleh masyarakat bekerjasama dengan pemerintah.

Pasraman Bhuana Puja berawal dari kegiatan perkumpulan anak – anak tanpa adanya wadah yang legal, namun karena kegiatan ini bersifat positif maka kemudian diberikan wadah dengan Pasraman Bhuana Puja. Adapun yang menjadi pendorong atau pemicu berdirinya Pasraman Bhuana Puja yaitu :

- a. Desa Karanganyar merupakan basis utama umat Hindu di wilayah Kecamatan Musuk karena jumlah umatnya paling banyak dan fasilitas paling memadai dibandingkan di wilayah yang lain di Kecamatan Musuk.
- b. Kurangnya pendidikan agama Hindu bagi anak dalam keluarga, dimana sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani.
- c. Jumlah umat Hindu yang berada dalam usia sekolah cukup banyak sehingga ada obyek dalam pasraman.
- d. Pola kehidupan masyarakat yang bersifat paguyuban sangat memungkinkan terjadinya hubungan yang erat antara masyarakat dengan pengurus pasraman.

Sepanjang pengamatan penulis, dalam kiprahnya di masyarakat Pasraman Bhuana Puja melakukan berbagai kegiatan. Kegiatan yang ada secara umum bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang agama Hindu kepada siswa sekolah.

Selain melakukan pembinaan kepada anak sekolah Pasraman Bhuana Puja juga melakukan pembinaan kepada umat Hindu yang ada. Dalam melakukan pembinaan kepada peserta seluruh pengurus Pasraman Bhuana Puja mengedepankan konsep *ngayah*, Seluruh guru dan pembina di Pasraman Bhuana Puja bekerja secara *ngayah*, hal ini mengingat dana yang ada dialokasikan kepada sarana dan prasarana maupun untuk dana kegiatan. Semua pengurus melakukannya dengan penuh kesadaran, karena apabila dana yang ada digunakan untuk membayar guru dan pembina tidak mencukupi, sehingga menghambat kinerja pasraman”

Peningkatan Pendidikan Hindu merupakan salah satu tanggung jawab Penyuluh Agama Hindu Non PNS, oleh sebab itu sangat tepat kiranya bahwa Pasraman Bhuana Puja menjadi salah satu sasaran Pembinaan Penyuluh Agama Hindu Non PNS dalam turut serta membangun dan meningkatkan Pendidikan Agama Hindu pada generasi muda.

3. Pura Satya Dharma

Pura Satya Dharma merupakan salah satu pura yang berada di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali tepatnya di Desa Sangup. Pura Satya Dharma dibangun diatas tanah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$. Pura Satya Dharma berada di bawah Gunung Merapi dibangun diatas Tanah Pekarangan Pinandita Mitro yang telah menghibahkan tanahnya untuk umat Hindu di Desa Sangup. Pura Satya Dharma yang ada saat ini dibangun diatas tanah miliknya.

Pura Satya Dharma Desa Sangup memiliki umat sekitar 80 jiwa yang mayoritas adalah orang tua, namun kegiatan yang dilakukan oleh umat sangat beragam, mulai dari perayaan hari besar keagamaan, persembahyangan setiap Selasa malam masih berjalan aktif sampai sekarang.

B. Metode dan Kegiatan Penyuluh Agama Hindu Non PNS dalam Pembinaan.

Secara umum Metode Penyuluhan dalam Agama Hindu ada enam yang disebut dengan *Sad Dharma* (Lastra : 2020). Metode pembinaan umat dan metode pendidikan agama adalah suatu metode atau cara yang ditempuh untuk menanamkan nilai-nilai agama Hindu ke dalam lubuk hati sanubari umat, sehingga nilai agama benar-benar merupakan bagian yang integral dalam diri pribadi setiap umat Hindu. Apabila agama telah menjadi bagian yang integral dalam pribadi setiap umat Hindu, maka agama akan kelihatan dalam segala tingkah laku umat Hindu baik secara individu maupun secara bersama-sama.

Tentang metode pendidikan agama dan metode pembinaan umat Hindu kiranya dapat mempergunakan metode yang telah ditetapkan dalam buku pedoman Pembinaan Umat Hindu yang telah dapat rekomendasi atau pengesahan pada Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia yang berlangsung pada tanggal 4-7 Februari 1988. Metode tersebut dikenal sebagai metode *Sad Dharma* yaitu, *Dharma Wacana*, *Dharma Tula*, *Dharmagita*, *Dharma Santi*, *Dharma Sadhana*, *Dharma Yatra*. Dalam melakukan pembelajaran terhadap siswa dan pembinaan terhadap umat Hindu yang ada, metode ini yang diterapkan oleh Penyuluh Agama Hindu Non PNS dalam melakukan pembinaan. Adapun dalam pengaplikasiannya dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Dharma Wacana.

Dharma Wacana adalah salah satu cara penyampaian materi ajaran Agama terhadap Umat Hindu untuk menanamkan nilai-nilai ajaran Agama Hindu sehingga dapat dipakai sebagai pedoman bertingkah laku. *Dharma Wacana* adalah metode penerangan Agama Hindu yang disampaikan pada setiap kesempatan Umat Hindu yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan (<http://chaniaization.blogspot.com>) *Dharma Wacana* adalah metode penerangan Agama Hindu yang sering disampaikan di siswa pasraman maupun pembinaan kepada umat.

Berkaitan dengan metode *Dharma Wacana* ini secara umum dilakukan pada setiap hari raya seperti *Purnama Tilem*, Hari raya *Saraswati*, *Galungan*, *Kuningan*, *Pagerwesi* maupun *Nyepi*. Tetapi metode ini perlu digunakan pada setiap pertemuan yang berhubungan dengan kegiatan umat Hindu.

2. Dharma Tula.

Dharma Tula adalah metode pendalaman agama melalui diskusi agama untuk mendapatkan kesamaan persepsi dalam meningkatkan penghayatan pada nilai-nilai yang dianut. Kata *Tula* berasal dari bahasa Sansekerta artinya perimbangan, keserupaan, dan bertimbang. Secara harfiah *Dharma Tula* dapat diartikan dengan bertimbang, berdiskusi atau berembung atau temu wicara tentang ajaran Agama Hindu dan *Dharma* (Lastra,2020).

Dharma Tula dimaksudkan sebagai metode pendalaman ajaran-ajaran

Metode *Dharma Tula* tidak asing lagi diterapkan dalam proses penyuluhan, metode ini lebih menitik beratkan pada peran *audiens* untuk berpartisipasi lebih aktif. Dengan *Dharma Tula* suasana pembinaan akan lebih hidup, serta diberikan kesempatan untuk menyampaikan isi hatinya berkaitan dengan materi penyuluhan, kegiatan *Dharma Tula* ini sangat cocok diterapkan kepada yang sedang menuju kedewasaan.

Melalui *Dharma Tula* ini akan tumbuh dan berkembang persepsi baru tentang ajaran Agama Hindu khususnya etika untuk bertingkah laku yang baik, tentu terkait dengan situasi dan kondisi yang ada, sehingga Agama akan selalu akan dapat berperan bagi kehidupan manusia di sepanjang jaman. Pilihan materi untuk anak sekolah dan pemuda dikaitkan dengan permasalahan remaja sehingga akan mencapai sasaran yang tepat sehingga lebih dewasa dalam berperilaku, sedangkan untuk orang tua, materi *Dharma Tula* dikaitkan dengan kiat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

3. ***Dharma Gita***

Dharma gita bila ditinjau dari segi etimologinya berasal dari kata *Dharma* dan *Gita*. *Dharma* berarti kebenaran dan *Gita* berarti nyanyian. *Dharma Gita* artinya nyanyian keagamaan atau kenyanjian kebenaran. Disebut nyanyian kebenaran karena *Dharma Gita* mengajarkan ajaran Weda (Lastra, 2020).

Kegiatan Penyuluhan dengan Metode *Dharma Gita* diharapkan dapat membentuk generasi muda mencintai budaya keagamaan. Metode *Dharma Gita* diterapkan dalam pembinaan dan pengajaran kepada siswa Pasraman dalam latihan pembacaan *Sloka*.

Dapat diketahui bahwa Kecamatan Musuk dan Kecamatan Tamansari memiliki prioritas untuk kegiatan keagamaan baik dalam mengisi ceremonial maupun dalam perwakilan lomba. Tidak heran karena di wilayah ini generasi muda tergolong besar dalam segi kuantitasnya, namun Penyuluh dan pemuka Agama berusaha untuk mengimbangi dengan kualitas yang baik pula. Selain pembinaan dibidang *Sloka*, pembinaan dengan metode *Dharma Gita* juga digunakan untuk pembinaan Kekidungan untuk generasi muda. Pembinaan kekidungan juga diberikan Penyuluh kepada anak-anak muda, hal ini tentu saja untuk menciptakan generasi muda yang cakap dan terampil dibidang *gegitaan*.

4. ***Dharma Santi***

Dharma Shanti adalah suatu ajaran untuk mewujudkan perdamaian diantara sesama umat manusia (<http://chaniaization.blogspot.com>). Acara *Dharma Shanti* ini dapat dilaksanakan sesuai dengan keperluan situasi dan relevansinya dengan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan. Kegiatan *Dharma Shanti* untuk saling maaf memaafkan dengan hati dan pikiran yang suci serta ucapan yang tulus ikhlas. masing-masing pihak secara sadar dan dengan segala keterbukaan serta kejernihan hati menghapuskan kekilafan dan kealpaan diantara sesama kita.

Secara umum *Dharma Shanti* dilaksanakan dalam menyambut tahun Baru Saka atau hari Raya Nyepi, namun di suatu daerah *Dharma Santi* juga dilaksanakan pada Hari Raya Galungan. Kegiatan *Dharma Shanti* untuk saling maaf memaafkan dengan hati dan pikiran yang suci serta ucapan yang tulus ikhlas. masing-masing pihak secara sadar dan dengan segala keterbukaan serta kejernihan hati menghapuskan kekilafan dan kealpaan diantara sesama kita.

Dari pengamatan penulis diketahui bahwa anak-anak yang mengikuti kegiatan latihan tari sangat beragam dari anak SD, maupun SMP. Hal inilah yang menjadi menarik setiap orang tua untuk selalu memberikan dukungan kepada anak-anaknya.

Pelaksanaan *Dharma Santi* untuk tingkat Kecamatan Musuk dian Kecamatan Tamansari diadakan secara rutin setiap tahun secara bergiliran. *Dharma Santi* tingkat Kecamatan terakhir dilaksanakan pada Nyepi Tahun 2019, sedangkan pada Tahun 2020 ditiadakan karena mengikuti anjuran Pemerintah dalam memutus penyebaran Virus Covid 19.

Kondisi negara pada Tahun 2020 dalam menghadapi persebaran Virus Covid 19 memang memberikan dampak yang besar terhadap kegiatan diberbagai bidang, salah satunya bidang keagamaan. Berdasarkan pengamatan penulis, justru umat Hindu lah yang pertama kali mendapat dampaknya. Hal ini dikarenakan kegiatan keagamaan yang pertama kali dibatasi adalah Tawur Agung Kesanga di Candi Prambanan, sehingga segala jenis keagamaan yang menyertai Hari Raya Nyepi seperti Dharma Shanti juga dibatasi oleh pemerintah.

5. **Dharma Sadana**

Metode *Dharma Sedhana* melaksanakan ajaran Dharma masing-masing peserta anak didik, dengan pelaksanaan melalui catur marga/yoga yakni : *Bhakti Marga*, *Karma Marga*, *Jnana Marga*, dan *Raja Marga atau Yoga Marga* (Lastra, 2020). Pelaksanaan Pembinaan yang dilakukan Penyuluh Agama Hindu Non PNS juga berorientasi kepada *Catur Marga* dan dilaksanakan secara terpadu kepada generasi muda maupun umat pada umumnya.

Dengan berpedoman pada *Bhakti Marga*, sebagai salah satu tugas Penyuluh yaitu memberikan pelayanan pada kegiatan persembahyangan. Metode *Dharma Sadana* dengan jalan *Bhakti Marga* dapat diterapkan untuk meningkatkan keaktifan dalam bersembahyang.

Kegiatan *Dharma Sadana* sering diartikan sebagai bentuk pemberian *Yadnya* atau Bantuan, bahwasanya *Dharma Sadana* bentuk *Yadnya* diambilkan dari Kelompok Pemberdayaan yang mana sebagian besar Pengurus dan Anggotanya adalah Penyuluh. *Yadnya* atau *Punia* yang diberikan dapat berwujud uang untuk menyokong kegiatan Hari Raya Agama maupun pemberian kepada umat Hindu.

Dalam hal *Dharma Sadana* dengan Konsep *Jnana Marga* dilakukan dengan memberikan Pendidikan dan Pembelajaran pada Siswa Pasraman yang dilaksanakan pada Minggu siang merupakan pembelajaran untuk kelompok siswa Sekolah Dasar. Kegiatan ini dilaksanakan dari jam 13.00 s/d 16.00. Dimana kelompoknya dibagi menjadi dua yaitu kelompok siswa Kelas 1-3 SD dan kelompok siswa kelas IV – VI SD.

Kegiatan Penyuluh Agama Hindu Non PNS Kecamatan Tamansari, Metode *Dharma Sadana* menerapkan Konsep *Catur Marga*. Hal ini diketahui bahwa untuk Konsep *Jnana Marga* diberikan kepada Siswa Pasraman melalui Pembelajaran, Konsep *Bhakti Marga* dengan mengajar generasi muda dalam melakukan persembahyangan, konsep *Karma Marga* dengan berbagi kepada sesame, dan *Yoga Marga* dengan memberikan latihan *Yoga Asanas* maupun *Yoga Samadi*.

6. **Dharma Yatra**

Dharma Yatra mempunyai pengertian yang hampir sama dengan *Tirta Yatra* yakni usaha untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Agama Hindu melalui kunjungan untuk persembahyangan ketempat-tempat suci, patirtan baik yang bertempat di pegunungan atau di tepi pantai (Lastra,2020). *Dharma yatra* atau *Tirta Yatra* sebagai perjalanan suci menurut kitab Sarasamuccaya dikatakan lebih utama daripada beryajna. Keutamaan *Tirta Yatra* itu dapat dilakukan oleh umat yang paling miskin sekalipun. Sarasamuccaya samapai menyebutkan demikian karena modal dharma yatra hanyalah niat yang suci dan tulus ikhlas.

Dalam melaksanakan *Dharma Yatra* Penyuluh mempunyai program untuk melakukan kunjungan ke tempat tempat suci, selain kegiatan yang dilakukan dilingkungan Pura, pasraman juga memiliki agenda untuk melakukan *Tirta Yatra*. *Tirta Yatra* ke beberapa Pura yang berada di sekitar Kecamatan Tamansari dan Musuk. Selain itu kami juga pernah melakukan kunjungan ke Candi Boko, Candi Suku, Candi Ijo dan Candi Prambanan.

3. Peran Penyuluh Agama Hindu Non PNS Terhadap Generasi Muda

Semenjak diangkatnya Penyuluh Agama Hindu Non PNS Di Kecamatan Musuk dan Kecamatan Tamansari dapat dilihat perannya dalam masyarakat. Sejauh ini hampir setiap kegiatan yang dilakukan di wilayah ini selalu melibatkan Penyuluh Agama Hindu Non PNS. Berdasarkan dari hasil pengamatan penulis diketahui tentang peran aktif Penyuluh Agama Hindu Non PNS dalam kehidupan umat Hindu di wilayah Kecamatan Tamansari pada umumnya dan umat Hindu Desa Karanganyar pada khususnya. Adapun dari hasil penelitian dapat dikemukakan peran Penyuluh Agama Hindu Non PNS di Kecamatan Tamansari sebagai berikut :

1.Meningkatkan Pendidikan Siswa Sekolah.

Pendidikan merupakan modal dalam hidup bermasyarakat, hal ini berarti dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan menghasilkan sumber daya yang lebih berkualitas. Oleh sebab itu sesuai dengan program kerja Penyuluh Agama Hindu Non PNS, salah satunya peningkatan pendidikan Agama Hindu maupun Pendidikan umum.

Penyuluh Agama Hindu Non PNS juga melakukan berbagai upaya untuk ikut dalam mencerdaskan bangsa khususnya umat Hindu. Salah satu kegiatan yang dilakukan berupa pembelajaran untuk siswa SD, SMP, dan SMA pada Pasraman Bhuna Puja.

Penyuluh dan telah diberikan honor oleh Pemerintah maka, Penyuluh Agama Hindu Non PNS berusaha untuk terjun dalam kehidupan umat Hindu dalam memberikan pelayanan Pendidikan. Dalam kegiatan ini Penyuluh Agama Hindu Non PNS memberikan materi berupa pendidikan agama Hindu maupun jejahitan. Sedangkan untuk siswa yang tidak mendapat pelajaran Pendidikan Agama Hindu di sekolahnya maka diberikan pelajaran sesuai dengan kurikulum.

Untuk sementara waktu pembelajaran untuk siswa sekolah lebih berorientasi pada peningkatan pemahaman terhadap agama Hindu. Sedangkan untuk program kerja berikutnya akan berusaha memberikan materi-materi umum, misalnya Bahasa Inggris, Matematika serta pengenalan Komputer.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa, dengan program kerja yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan ini Penyuluh Agama Hindu Non PNS telah berusaha untuk ikut meningkatkan sumber daya manusia Hindu yang lebih baik.

2. Meningkatkan Mental dan Spritual Pemuda Hindu.

Dalam upaya meningkatkan mentalitas pemuda Hindu di wilayah Desa Karanganyar, Penyuluh Agama Hindu Non PNS memiliki kegiatan yang telah berjalan sekian waktu. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengadakan pembinaan terhadap anak remaja. Anak remaja yang dimaksud adalah anak sekolah usia SMP, SMA, maupun Mahasiswa. Hal ini dengan alasan usia remaja sangat rentan terhadap hal-hal negatif dari pergaulannya.

Untuk menghindari pandangan negatif tentang pemuda Hindu maka dilaksanakan Pertemuan Pemuda Hindu pada malam minggu. Hal ini dapat dibenarkan bahwasannya malam minggu merupakan hari untuk bersenang-senang dan mencari hiburan, sehingga tidak sedikit anak muda yang berjalan-jalan atau sekedar nongrong dijalan. Terobosan yang dilakukan Penyuluh Agama Hindu Non PNS inilah untuk mengurangi anak muda terutama pemuda Hindu untuk tidak hura-hura pada malam minggu tetapi, berkumpul di Pura untuk melakukan kegiatan keagamaan.

Sedangkan dalam upaya untuk meningkatkan spiritualitas umat khususnya pemuda diadakan latihan meditasi. Tentu saja latihan meditasi ini diberikan kepada peserta pasraman yang telah berumur diatas 18 tahun. Hal ini dikarenakan latihan meditasi ini dilakukan pada tengah malam. Latihan meditasi bukan untuk membuat sakti peserta pasraman. Tetapi untuk melatih peserta pasraman belajar mengendalikan diri sendiri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelatihan meditasi ini dapat meningkatkan spiritual pemuda Hindu di Desa Karanganyar.

3. Meningkatkan Pengetahuan Agama Hindu dan Keimanan Umat.

Pembinaan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Hindu Non PNS tidak terbatas bagi kalangan anak sekolah atau pemuda, tetapi juga dilakukan pada orang tua. Hal ini dengan sebuah alasan bahwa pada dasarnya umat Hindu yang sudah tua, belum pernah mendapatkan pendidikan tentang agama Hindu. Pada umumnya mereka melakukan aktifitas keagamaan atas dasar keyakinan. Hal ini memang dapat dipandang baik, tetapi sebagai Penyuluh Agama Hindu Non PNS berupaya memberikan pengetahuan keagamaan seperti yang diberikan disekolah.

Pada dasarnya pembinaan terhadap umat Hindu yang lebih tua dari Penyuluh Agama Hindu Non PNS bukan bermaksud untuk mencari kegagahan, namun sebatas memberikan pengetahuan sehingga mereka dapat meningkatkan *sradha* dan *bhakti* umat Hindu. Upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang agama Hindu dan *sradha* ini terealisasi dengan pembinaan pada ibu-ibu rumah tangga.

4. Melestarikan Kebudayaan.

Dalam hal Latihan Karawitan sebagai Penyuluh dirinya belum dapat memberikan bimbingan namun masih mendampingi dan bekerja sama dengan tokoh yang menguasai di bidang tersebut. Dengan adanya peran Penyuluh Agama Hindu Non PNS dalam kegiatan telah menunjukkan usaha untuk ikut *nguri-uri* kebudayaan Jawa. Hal ini dikarenakan seni Karawitan merupakan sebuah hasil cipta, rasa, karsa dan karya manusia.

Perilaku melestarikan kebudayaan ini bukan saja hanya dilakukan dengan mengadakan latihan saja, tetapi seni karawitan ini dipentaskan di setiap Hari Raya yang dilaksanakan di Pura Bhuana Puja. Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa Penyuluh Agama Hindu Non PNS telah berusaha untuk ikut melestarikan kebudayaan dalam bentuk seni karawitan.

5. Melakukan Kaderisasi Terhadap Tokoh-tokoh Hindu.

Pada dasarnya kegiatan kaderisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk membentuk tokoh-tokoh Hindu dimasa mendatang. Peran pemuda dalam berbagai kegiatan telah dapat nampak. Hal ini terbukti hampir disetiap kegiatan yang dilakukan di Pura Bhuana Puja selalu melibatkan generasi muda sebagai panitia, maupun pengurusnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penyuluh Agama Hindu Non PNS telah melakukan kaderisasi dengan melibatkan generasi muda Hindu sebagai pemimpin dalam setiap kegiatan yang ada.

6. Meningkatkan Kerukunan antar umat Hindu.

Penyuluh Agama Hindu Non PNS selalu sebagai garda terdepan dalam melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kerukunan antar umat Hindu. Kegiatan yang dilakukan ini memiliki maksud untuk memperkokoh tali persaudaraan antar umat Hindu di Kecamatan Tamansari pada khusus serta umat Hindu yang berada di sekitarnya. Dalam meningkatkan kerukunan Penyuluh Agama Hindu Non PNS acara Tirta Yatra ke Pura tidak hanya di wilayah Kecamatan Tamansari saja Tirta Yatra ini dilakukan, tetapi juga dilakukan ke Kecamatan lain seperti Kecamatan Jatinom, Kecamatan Karangnongko, Kecamatan Banyudono dan Kecamatan lain disekitarnya. Kegiatan *Tirta Yatra* ini selain untuk meningkatkan kerukunan juga memiliki tujuan sebagai biro jodoh. Hal ini merupakan sebuah upaya untuk mempertahankan keberadaan umat Hindu yang ada.

Selain dengan mengadakan *Tirta Yatra* upaya untuk meningkatkan kerukunan antar umat Hindu, Penyuluh Agama Hindu Non PNS selalu memberikan semangat dan mengajak Pemuda Hindu dalam menghadiri acara-acara yang bernuansakan agama Hindu.

Dari berbagai peranan yang telah disampaikan diatas dapat penulis simpulkan bahwa Penyuluh Agama Hindu Non PNS memiliki peranan yang sangat penting terhadap aktifitas umat Hindu.

7. Respon Umat Terhadap Penyuluh Agama Hindu Non PNS

Keberadaan Penyuluh Agama Hindu Non PNS Kabupaten Boyolali telah terakomodir dengan baik, hal ini terlihat dengan terbentuknya Kelompok Desa Binaan dan pembagian wilayah binaan yang merata. Dengan melihat sebaran wilayah binaan yang ada menunjukkan bahwa Kecamatan Tamansari memiliki Penyuluh yang paling banyak. Hal ini dikarenakan jumlah generasi muda diwilayah ini sangat banyak. Dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Hindu Non PNS ini menimbulkan penilaian dari masyarakat Hindu.

Kendala yang dihadapi oleh Penyuluh Agama Hindu Non PNS dalam Pembinaan.

Penyuluh Agama memiliki empat fungsi *Pertama* Fungsi informatif memposisikan dirinya sebagai orang yang berkewajiban menyampaikan pesan-pesan ajaran agama, *Kedua* Fungsi Edukatif memposisikan diri sebagai pembina atau mendidik masyarakat sesuai dengan tuntunan ajaran agama, *Ketiga* Fungsi Konsultatif menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan pribadi, keluarga

maupun masyarakat secara umum dan *Keempat* Fungsi Advokatif Penyuluh agama memiliki tanggung jawab moral dan social untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap masyarakat dari segala bentuk kegiatan/pemikiran yang akan merusak keimanan dan tatanan kehidupan beragama.

Sebagai Penyuluh Agama harus memiliki tiga tuntutan yang harus dimiliki hal ini dikarenakan Penyuluh merupakan salah satu prioritas Nasional. Tiga tuntutan yang harus dimiliki seorang Penyuluh Agama antara lain *Pertama*, tergaransinya wawasan keagamaannya artinya sebagai seorang Penyuluh harus mampu untuk menjadi teladan dalam keagamaan, serta tidak diragukan lagi kesetiiaannya dalam memeluk Agamanya. Dengan demikian sebagai Penyuluh Agama Hindu harus memiliki komitmen secara pribadi untuk memeluk Agamanya secara utuh dan juga memiliki komitmen untuk menjaga keutuhan umatnya. *Kedua* tergaransinya wawasan kebangsaannya, artinya seorang Penyuluh Agama harus menguasai tentang berbagai pengetahuan terkait komitmennya untuk memajukan dan berbakti pada negaranya. Dengan demikian Penyuluh Agama Hindu memiliki tuntutan untuk turut membangun bangsa melalui kegiatan yang positif. *Ketiga*, tergaransinya profesionalismenya, artinya seorang Penyuluh Agama harus dapat memposisikan dirinya serta melaksanakan seluruh tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Menurut Lastra (2020) realitas beragama dibagi menjadi dua yaitu *Pertama* semangat beragama yang tinggi. Realitas yang dapat dilihat ketika bangsa ini memiliki semangat beragama yang tinggi antara lain, Tempat Ibadah yang megah, Hari Raya Agama yang megah, Upacara Agama yang Megah, Ibadah Agama yang megah, Kotbah Agama yang Megah, Ibadah Sosial yang Megah, Pendidikan Agama yang berkualitas dan Perguruan Tinggi Agama yang berkualitas pula. *Kedua* Moralitas yang rendah dengan ditandai adanya maraknya kasus sadisme, Radikalisme, kasus tawuran, Narkoba, krisis keteladanan dan Sex bebas dikalangan remaja. Oleh sebab itu keberadaan Penyuluh Agama Hindu diharapkan dapat menciptakan realitas yang pertama.

Dalam melakukan tugas penyuluhan dan bimbingan seorang Penyuluh Agama Hindu Non PNS harus memiliki empat tugas utama, yaitu persiapan bimbingan, pelaksanaan bimbingan, pelayanan konsultasi Agama dan melakukan evaluasi dari apa yang telah dilakukan, hal ini sangat perlu dilakukan agar Penyuluhan dapat secara maksimal dan tepat sasaran. Oleh karena itu perlu kiranya seorang Penyuluh memiliki dua strategi yaitu mengenali wilayah binaan dan mengenali kelompok sasaran.

Pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Hindu Non PNS di Kecamatan Tamansari secara umum telah berjalan dengan baik, hal ini terlihat adanya rutinitas kegiatan keagamaan yang ada di wilayah tersebut, baik yang dilakukan di Pura maupun kegiatan keagamaan lainnya. Namun kegiatan Penyuluhan yang dilakukan tidak terlepas dari kendala-kendala yang dialami oleh Penyuluh itu sendiri.

Kondisi Wilayah Binaan yang Jauh Dari Jangkauan

Wilayah binaan merupakan salah satu penentu dari penyuluhan, wilayah binaan yang mudah dijangkau akan mempermudah dan memperlancar pelaksanaan pembinaan. Kondisi umat Hindu di Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Musuk terbagi di wilayah yang berbeda, Desa Karanganyar merupakan daerah yang mudah dijangkau, meskipun berada di wilayah pegunungan namun akses ke lokasi lebih mudah. Desa Kembangsari meskipun berada di dataran yang agak tinggi namun akses ke lokasi tidaklah sulit karena berada

diwilayah ibu kota Kecamatan. Wilayah binaan dan umat Hindu yang sulit dijangkau di Desa Sangup, hal ini dikarenakan berada di lereng Gunung Merapi dengan jarak jangkauan yang jauh dari tempat tinggal Penyuluh.

Strategi Menghadapai Peserta Pembinaan.

Tantangan Penyuluh Agama Hindu kedepan sangat berat yaitu tantangan secara internal diri sendiri yang dituntut harus mampu menjadi teladan bagi umat, tuntutan budaya kerja yang diberikan oleh Pemerintah serta untuk mendapatkan apresiasi dari umat terkait kinerja yang telah dilakukan. Oleh sebab itu sebagai Penyuluh Agama Hindu harus mampu menunjukkan kinerja yang profesional demi kemajuan umat Hindu di Jawa Tengah pada khususnya.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan Uraian yang telah disampaikan diatas maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Penyuluh Agama Hindu Non PNS wilayah Kecamatan Tamansari telah melaksanakan kegiatan Penyuluhan pada semua jenjang usia dari anak-anak, Remaja dan Orang Tua. Metode yang digunakan untuk melakukan penyuluhan yaitu dengan Metode Sad Dharma dengan Lokasi Pembinaan di Pura Bhuana Puja, Pasraman Bhuana Puja, Pura Satya Dharma, Pura Yasa Dharma, Paguyuban KORPRI Kecamatan Musuk. Pembagian wilayah binaan telah disepakati oleh masing-masing Penyuluh Agama Hindu Non PNS di Kecamatan Tamansari Agus Sugiyono di Pura Satya Dharma, Agung Puji Widoyo di Pura Yasa Dharma, Wiyono dan Purwani di Pura Bhuana Puja.
2. Peran Penyuluh Agama Hindu Non PNS dalam meningkatkan Pendidikan dan Sradha Generasi Muda Hindu diarahkan kepada Peningkatan Pendidikan Siswa Sekolah, Peningkatan Mental dan Spiritual Generasi Muda Hindu, Meningkatkan Pengetahuan Agama Hindu dan Keimanan Umat, Melestarikan Kebudayaan, Melakukan Kaderisasi Terhadap Tokoh-tokoh Hindu, dan Meningkatkan Kerukunan antar umat Hindu.
3. Kendala yang dihadapi oleh Penyuluh Agama Hindu Non PNS secara umum dibagi menjadi dua yaitu pada kondisi wilayah binaan yang tergolong jauh dari tempat tinggal Penyuluh, sehingga kurang maksimal dalam melakukan penyuluhan sehingga agar semua kegiatan dapat terlaksana maka dijadwalkan dengan baik dalam pengaturan waktu. Kendala yang kedua adalah melibatkan kurangnya kesadaran anak muda dalam mengikuti pembinaan sehingga terkesan tidak serius dalam mengikuti pembinaan, serta umat yang kurang memahami Bahasa Indonesia membuat Penyuluh belajar ulang dalam menghadapi Umat Hindu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, Ryanandha, 2005. “ *Pola dan Metode Pembelajaran dan Pasraman Mertasari dalam Upaya Peningkatan Spiritual Remaja Hindu di Desa Trimurjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah*. Skripsi : STHD Klaten
- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Edisi Revisi 5), Jakarta: Renika Cipta.
- Badudu-Zein, 1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Harapan Indonesia.
- Dep Dik Nas, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Dimiyati-Mudjiono, 2006. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta : Rika Cipta
- Lastra, I Nyoman, 2020. *Peran Penyuluh Agama Hindu dalam Penguatan Moderasi Agama*. Semarang (Makalah Pembinaan Pengembangan Program Penyuluhan)
- Lestari, Nani. 2009. *Pengaruh Pinandita Terhadap Umat Hindu di Pura Marga Loka Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten*. Skripsi : STHD Klaten Jawa Tengah
- Mardwiatmoko. 2007. *Peranan Pemuka Agama Hindu Dalam Pembinaan Umat Hindu Di Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten*. Skripsi : STHD Klaten.
- Iqbal, hasan. 2002 *pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Indonesia: Gahilia
- Kaelan, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Koentjaraningrat, 1985. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembagunan*. Jakarta: gramedia.
- Margono, S. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Marzoeki, Djohansjah, 2000. *Budaya Ilmiah dan filsafat Ilmu*. Jakarta: grasindo
- Moleong, L. J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya.
- Narbuko,Cholik. 2001. *Metodologi penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara
- Nasir, Moh, 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Netra, IB.1974. *Diklat Metodologi Penelitian*, FakultasKeguruan dan ilmu Pendidikan : UNUD Singaraja

- Poerwadarminta, W.J.S. 1985. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Pudja, Gede, 2003. *Bhagawad Gita*. Surabaya : Paramita.
- Ratna, I Nyoman Kutha. 2004. *Teori, Metode dan Teknik Penulisan Sastra*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Riduawan, 2004. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*. An Bandung: Alfabeta.
- Ritzer, George, 2003. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta : PT Raja Grafindo Pesada.
- Sifullah, Ali, 1981. *Pendidikan pengajaran dan kebudayaan*, Surabaya : Usaha Nasional.
- Sudikan, Setya Yuwana. 1989, *Penuntun Karya ilmiah*, Semarang : Aneka Ilmu
- Sugiman, I. N. S. (2020). KINERJA PENYULUH AGAMA HINDU NON PNS DITIJAU DARIFUNGSI PENYULUH DI MASA PANDEMI COVID-19. *Widya Aksara*, 25(2), 153–163. <http://ejournal.sthd-jateng.ac.id/index.php/WidyaAksara/article/view/120/57>
- Wiana, I Ketut, 1997, *Beragama Bukan Hanya Di Pura*, Denpasar, Yayasan Dharma Naradha (<https://kbbi.web.id>).
- <http://chaniaization.blogspot.com>